

MEMBACA ULANG PERADABAN ISLAM ABAD PERTENGAHAN: PENDEKATAN SEJARAH SOSIAL

Engra Ramadhan Ilahi^a, Nelmawarni^b, Efendi^c, Kholidah^d

engraramadhan05@gmail.com, nelmawarni@uinib.ac.id, efendimaq@uinib.ac.id, kholidah@uinib.ac.id

abcd UIN Imam Bonjol Padang, Indonesia

ARTICLE INFO

Received: 4th January 2026

Revised: 21th April 2026

Accepted: 26th April 2026

Published: 28th April 2026

Permalink/DOI

<https://doi.org/10.51190/jazirah.v6i3.330>



This work is licensed under CC BY-SA 4.0.

Print ISSN: 2716-4454,
Online ISSN: 2774-3144

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk membaca ulang peradaban Islam abad pertengahan melalui pendekatan sejarah sosial dengan menempatkan masyarakat sebagai aktor utama dalam proses pembentukan dan transformasi peradaban. Kajian ini berangkat dari kritik terhadap historiografi konvensional yang cenderung menekankan peran elite politik dan intelektual, sehingga mengabaikan dinamika sosial yang menopang keberlanjutan peradaban Islam. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif historis-sosial dengan teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan dan analisis dokumen historis, meliputi sumber primer dan sekunder yang relevan dengan konteks Abbasiyah. Data dianalisis menggunakan analisis naratif dan analisis isi historis untuk mengungkap struktur sosial, relasi antarkelompok, serta praktik kehidupan sosial masyarakat Muslim abad pertengahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peradaban Islam abad pertengahan ditopang oleh struktur sosial yang relatif terbuka, penghargaan terhadap ilmu pengetahuan sebagai modal sosial, serta keberadaan institusi intelektual seperti Bait al-Hikmah yang berfungsi sebagai ruang sosial dan simbol peradaban. Ilmu pengetahuan tidak dipahami sebagai aktivitas individual, melainkan sebagai praktik sosial kolektif yang terintegrasi dengan kekuasaan, ekonomi, dan budaya. Temuan ini menegaskan bahwa kemajuan peradaban Islam merupakan hasil dari proses sosial yang kompleks dan berlapis, bukan semata-mata akibat kejayaan politik atau tokoh besar. Secara teoretis, penelitian ini memperkaya kajian peradaban Islam melalui penguatan pendekatan sejarah sosial. Secara praktis, hasil penelitian ini relevan untuk pengembangan pendidikan sejarah Islam yang lebih kritis dan kontekstual, serta membuka peluang penelitian lanjutan terkait dinamika sosial kelompok non-elite dalam sejarah Islam.

KATA KUNCI:

Peradaban Islam, sejarah sosial, Abbasiyah, ilmu pengetahuan, Bait al-Hikmah

ABSTRACT

This study aims to re-examine Islamic civilization in the medieval period through a social history approach that positions society as the primary actor in the formation and transformation of civilization. The study departs from a critique of conventional historiography that tends to emphasize political elites and prominent intellectual figures, thereby overlooking the social dynamics that sustained Islamic civilization. This research employs a qualitative historical-social approach, using library research and historical document analysis as data collection techniques, drawing on relevant primary and secondary sources related to the Abbasid context. Data were analyzed using narrative analysis and historical content analysis to uncover social structures, intergroup relations, and everyday social practices of medieval Muslim society. The findings indicate that medieval Islamic civilization was supported by a relatively open social structure, an appreciation of knowledge as social capital, and the existence of intellectual institutions such as the Bait al-Hikmah, which functioned both as a social space and a symbol of civilization. Knowledge was not understood as an individual endeavor, but rather as a collective social practice integrated with power, economy, and culture. These findings affirm that the advancement of Islamic civilization was the result of complex and multilayered social processes, rather than merely the product of political dominance or exceptional individuals. Theoretically, this study contributes to Islamic civilization studies by reinforcing the relevance of the social history approach. Practically, the findings are relevant for the development of a more critical and contextualized approach to Islamic history education and open avenues for further research on the social dynamics of non-elite groups in Islamic history.

KEYWORDS:

Islamic civilization, social history, Abbasid period, knowledge production, Bait al-Hikmah

PENDAHULUAN

Peradaban Islam abad pertengahan merupakan salah satu fase historis paling menentukan dalam perjalanan peradaban manusia, baik dalam konteks dunia Islam maupun peradaban global. Pada periode ini, masyarakat Muslim tidak hanya membangun sistem keilmuan yang kompleks, tetapi juga mengembangkan struktur sosial, institusi pendidikan, dan praktik budaya yang berpengaruh lintas wilayah dan zaman. Sejumlah kajian kontemporer menunjukkan bahwa capaian peradaban Islam abad pertengahan mencakup integrasi antara ilmu keagamaan, ilmu rasional, praktik ekonomi, serta tata kelola sosial yang relatif adaptif terhadap keragaman masyarakat¹. Namun demikian, pemahaman terhadap peradaban Islam pada periode ini masih kerap terjebak dalam narasi besar yang menekankan aspek politik dan intelektual elite, sehingga mengabaikan dinamika sosial yang sesungguhnya menopang keberlanjutan peradaban tersebut.

Dalam diskursus global, historiografi peradaban Islam abad pertengahan sering disajikan melalui dua kutub ekstrem, yakni glorifikasi kejayaan dan narasi kemunduran. Pendekatan ini, sebagaimana dikritik dalam artikel Melati, (2025)² cenderung mereduksi sejarah menjadi rangkaian peristiwa besar yang dipimpin oleh tokoh-tokoh dominan, seperti khalifah, sultan, dan ilmuwan ternama. Akibatnya, masyarakat luas yang terlibat dalam aktivitas ekonomi, pendidikan informal, produksi budaya, dan jaringan sosial tidak memperoleh perhatian yang seimbang. Padahal, bukti-bukti historis menunjukkan bahwa kehidupan sosial masyarakat Muslim abad pertengahan bersifat plural, dinamis, dan berlapis, serta memainkan peran penting dalam proses pembentukan dan transformasi peradaban. Kondisi serupa juga tampak dalam konteks nasional Indonesia. Kajian sejarah peradaban Islam yang diajarkan di lembaga pendidikan maupun yang berkembang dalam literatur akademik masih didominasi oleh pendekatan deskriptif-kronologis. Materi pembelajaran cenderung menempatkan peradaban Islam abad pertengahan sebagai masa keemasan ilmu pengetahuan yang kemudian mengalami kemunduran akibat konflik politik internal dan tekanan eksternal. Temuan empiris dari studi pendidikan sejarah menunjukkan bahwa mahasiswa sering kali memahami periode ini secara simplistik, tanpa mampu menjelaskan bagaimana struktur sosial, relasi kekuasaan, dan praktik kehidupan sehari-hari membentuk arah perkembangan peradaban³. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara kompleksitas realitas sejarah dan cara sejarah tersebut direpresentasikan dalam wacana akademik dan pendidikan.

Permasalahan tersebut semakin mengemuka ketika historiografi Islam masih banyak dipengaruhi oleh pendekatan orientalis klasik yang menempatkan

¹ Bahrum Subagiya, 2024, "Islamic Learning Horizons : Kepemimpinan Visioner Khalifah Harun Al-Rasyid Dalam Pengembangan Ilmu Pengetahuan Di Masa Peradaban Islam" no. March: hlm. 1-10.

² Melati, (2025)

³ Endang Supriatna, 2024, "Kajian Pemikiran Tokoh Pendidikan Dunia," 15: hlm. 73-80.

peradaban Islam sebagai entitas statis dan reaktif. bahwa sebagian besar narasi sejarah Islam modern masih mereproduksi kerangka epistemologis yang memisahkan antara agama dan masyarakat, sehingga gagal menangkap interaksi timbal balik antara nilai-nilai keislaman dan realitas sosial. Dalam kerangka ini, Islam dipahami sebagai sistem normatif semata, bukan sebagai praktik sosial yang hidup dan berkembang dalam konteks historis tertentu. Akibatnya, pengalaman sosial masyarakat Muslim abad pertengahan menjadi kurang tereksplorasi secara mendalam⁴.

Dari perspektif sejarah sosial, pendekatan semacam ini menimbulkan persoalan epistemologis yang serius. Sejarah sosial memandang peradaban sebagai hasil interaksi kompleks antara struktur sosial, relasi kekuasaan, dan tindakan manusia dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, memahami peradaban Islam abad pertengahan tanpa menelaah basis sosialnya berarti mengabaikan dimensi fundamental yang memungkinkan peradaban tersebut tumbuh dan bertahan. Sejumlah sumber primer seperti catatan wakaf, kitab biografi ulama, arsip perdagangan, dan kronik kota menunjukkan bahwa masyarakat Muslim abad pertengahan memiliki mekanisme sosial yang canggih dalam mengelola pendidikan, ekonomi, dan solidaritas sosial⁵.

Pentingnya pendekatan sejarah sosial dalam membaca ulang peradaban Islam abad pertengahan juga berkaitan erat dengan upaya membongkar narasi homogenisasi. Pada dasarnya masyarakat Islam abad pertengahan tidak pernah bersifat monolitik, melainkan terdiri dari berbagai kelompok sosial dengan kepentingan dan pengalaman yang berbeda. Ulama, pedagang, pengrajin, petani, perempuan, dan komunitas minoritas memainkan peran yang saling terkait dalam kehidupan sosial. Ketika historiografi hanya berfokus pada elite politik dan intelektual, maka relasi sosial antar kelompok tersebut menjadi tidak terlihat, padahal justru di situlah dinamika peradaban berlangsung secara nyata. Dari sudut pandang sosial dan budaya, pembacaan ulang peradaban Islam abad pertengahan menjadi relevan karena sejarah tidak hanya berfungsi sebagai arsip masa lalu, tetapi juga sebagai medium pembentukan identitas dan orientasi masa depan. Dalam penelitian terdahulu, Elsanía Revansya et al., 2024⁶ menekankan bahwa cara suatu masyarakat memahami sejarah Islam akan memengaruhi cara mereka memaknai keberislaman dan relasi sosial di masa kini. Ketika sejarah disajikan secara normatif dan elitis, maka potensi kritis dan reflektif dari sejarah tersebut

⁴ Nola Ariesta Elvan and Duski Samad, 2024, "Sejarah Pendidikan Islam Dari Klasik , Pertengahan , Dan Modern," 1: hlm. 130-40.

⁵ Alya Hasya Azqia and Tenny Sudjatnika, 2025, "Peran Madrasah Dan Waqaf Dalam Pembentukan Masyarakat Ilmiah Pada Masa Keemasan Islam," 1, no. 4: hlm. 2252-66.

⁶ Elsanía Revansya et al., 2024, "Menyelami Sejarah Peradaban Islam Dari Konsep Hingga Metode Penggalan Yang Mendalam," 1, no. 2: hlm. 38-43.

menjadi tumpul. Sebaliknya, pendekatan sejarah sosial memungkinkan pembaca untuk melihat Islam sebagai pengalaman hidup yang beragam dan kontekstual.

Dalam konteks pendidikan, keterbatasan pendekatan historiografi konvensional berdampak pada lemahnya kemampuan analitis dalam memahami sejarah Islam. Studi-studi mutakhir menunjukkan bahwa pendekatan yang terlalu menekankan hafalan peristiwa dan tokoh cenderung menghambat pengembangan pemikiran kritis dan historis⁷. Padahal, pendidikan sejarah seharusnya mendorong pembaca untuk memahami proses sosial, konflik kepentingan, dan dinamika perubahan yang membentuk suatu peradaban. Dengan demikian, pendekatan sejarah sosial tidak hanya relevan secara akademik, tetapi juga memiliki implikasi pedagogis yang signifikan.

Meskipun minat terhadap kajian sejarah Islam yang lebih kontekstual mengalami peningkatan dalam satu dekade terakhir, penelitian-penelitian tersebut masih menunjukkan keterbatasan tertentu. Banyak studi yang mengkaji institusi pendidikan Islam, jaringan ulama, atau perkembangan ilmu pengetahuan, tetapi belum secara sistematis mengaitkannya dengan struktur sosial masyarakat secara keseluruhan. Selain itu, kajian yang mengintegrasikan teori sosial modern dengan tradisi pemikiran Islam klasik masih relatif terbatas. Kekosongan ini menunjukkan adanya peluang penelitian yang signifikan untuk mengembangkan pendekatan yang lebih komprehensif dalam studi peradaban Islam abad pertengahan.

Integrasi teori sosial modern dan pemikiran Islam klasik merupakan salah satu aspek penting dalam pembacaan ulang peradaban Islam. Konsep struktur dan agensi yang dikembangkan oleh Ahmad Muwafiq and Lintas Historis (2024),⁸ memungkinkan peneliti untuk melihat bagaimana individu dan kelompok masyarakat berinteraksi dengan struktur sosial yang ada. Dalam konteks Islam abad pertengahan, konsep ini dapat digunakan untuk menganalisis bagaimana ulama, pedagang, dan komunitas lokal berperan aktif dalam membentuk praktik keagamaan dan sosial, sekaligus dipengaruhi oleh struktur kekuasaan politik dan norma keagamaan. Di sisi lain, pemikiran Ibn Khaldun tentang peradaban sebagai hasil dinamika sosial dan solidaritas kelompok memberikan landasan teoritis yang relevan dari tradisi Islam itu sendiri. Pendekatan sejarah sosial juga membuka ruang untuk menelaah pengalaman kelompok yang selama ini terpinggirkan dalam historiografi Islam.⁹, menunjukkan bahwa perempuan dan komunitas urban memiliki peran penting dalam kehidupan keagamaan dan sosial masyarakat Islam

⁷ Miftahur Rohman et al., 2019, "Problematika Pembelajaran Sejarah Kebudayaan Islam Kurikulum KMA 183 Tahun 2019 Madrasah Ibtidaiyah," 9, no. 2.

⁸ Ahmad Muwafiq and Lintas Historis, 2024, "Potret Studi Islam Dalam Lintasan Historis," 09, no. 02: hlm. 191–212.

⁹ Ahla Ibtisyamur Rohma, 2025, "Peran Aktif Perempuan Dalam Kemajuan Peradaban Islam Dari Masa Ke Masa," 5, no. 2.

abad pertengahan, meskipun peran tersebut jarang muncul dalam narasi sejarah arus utama. Dengan menempatkan pengalaman kelompok-kelompok ini sebagai bagian integral dari analisis sejarah, penelitian dapat memberikan gambaran yang lebih utuh dan adil tentang peradaban Islam.

Dalam penelitian terdahulu oleh Muwafiq & Rahman (2024)¹⁰, mengkaji perkembangan studi Islam dalam lintasan historis yang dibagi ke dalam tiga periode utama, yaitu klasik, pertengahan, dan modern. Hasil penelitian menunjukkan bahwa studi Islam mengalami dinamika yang fluktuatif, ditandai dengan fase kejayaan pada masa klasik, stagnasi pada periode pertengahan, serta upaya pembaruan pada masa modern. Meskipun penelitian tersebut memberikan gambaran komprehensif mengenai perkembangan studi Islam secara historis, terdapat beberapa kesenjangan yang belum dikaji secara mendalam, pertama penelitian tersebut masih bersifat makro-historis dan cenderung deskriptif kronologis, Kedua, pendekatan yang digunakan masih terbatas pada pendekatan historis deskriptif, tanpa mengintegrasikan perspektif sejarah sosial.

Selanjutnya penelitian oleh Sari & Setiadi, (2020)¹¹ yang mengkaji masa keemasan Islam pada abad pertengahan dengan menitikberatkan pada relasi antara pemikiran dan perkembangan peradaban. Penelitian ini menggunakan metode studi literatur dan menunjukkan bahwa kemajuan peradaban Islam tidak terlepas dari integrasi antara agama dan sains. Penelitian ini juga menyoroti peran penting gerakan penerjemahan, khususnya pada masa Dinasti Abbasiyah, yang memungkinkan transfer ilmu dari peradaban Yunani, Persia, dan India ke dunia Islam. Kedua penelitian tersebut masih bersifat deskriptif dan berorientasi pada narasi makro serta tokoh dan institusi, sehingga belum mengkaji secara mendalam dimensi sosial seperti relasi kekuasaan, struktur masyarakat, dan dinamika kehidupan sosial umat Islam. Kesenjangan ini menunjukkan bahwa belum adanya analisis berbasis pendekatan sejarah sosial yang mampu merekonstruksi peradaban sebagai hasil interaksi kompleks antar aktor dan struktur sosial.

Berdasarkan paparan tersebut, terlihat jelas bahwa kajian peradaban Islam abad pertengahan membutuhkan pendekatan yang mampu menangkap kompleksitas sosial dan kultural masyarakatnya. Keterbatasan studi sebelumnya yang terlalu berfokus pada elite dan institusi formal menunjukkan perlunya pembacaan ulang yang lebih inklusif dan kontekstual. Pendekatan sejarah sosial menawarkan kerangka analisis yang memungkinkan peneliti untuk menggali makna, pengalaman, dan proses sosial yang selama ini kurang mendapat perhatian dalam kajian sejarah Islam.

¹⁰ Muwafiq & Rahman (2024)

¹¹ Sari & Setiadi, (2020)

Penelitian ini bertujuan untuk membaca ulang peradaban Islam abad pertengahan melalui pendekatan sejarah sosial dengan menempatkan masyarakat sebagai aktor utama dalam proses sejarah. Fokus kajian diarahkan pada struktur sosial, relasi antar kelompok, dan praktik kehidupan sehari-hari yang membentuk dan mentransformasikan peradaban Islam pada periode tersebut. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan analisis historis-sosial terhadap sumber-sumber primer dan sekunder, penelitian ini berupaya mengungkap dinamika sosial yang sering tersembunyi di balik narasi besar sejarah Islam. Secara teoretis, penelitian ini berkontribusi pada pengembangan kajian sejarah peradaban Islam dengan memperkuat penggunaan pendekatan sejarah sosial dan integrasi teori sosial modern dengan pemikiran Islam klasik. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur sejarah Islam, memberikan perspektif alternatif dalam pendidikan sejarah, serta mendorong pembacaan sejarah peradaban Islam yang lebih kritis, inklusif, dan relevan dengan tantangan masyarakat kontemporer.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif historis-sosial yang bertujuan untuk memahami secara mendalam realitas sosial dan makna di balik fenomena peradaban Islam abad pertengahan sebagaimana direkonstruksi dari sumber-sumber historis. Pendekatan ini sesuai karena penelitian kualitatif menekankan pemahaman konteks sosial dan budaya dari perspektif berbagai aktor dalam dinamika kehidupan mereka. Metode sejarah sosial dipilih khususnya karena karakteristiknya yang memungkinkan peneliti untuk tidak hanya merekonstruksi peristiwa masa lalu secara kronologis, tetapi juga menafsirkan relasi sosial, struktur kekuasaan, dan proses sehari-hari yang membentuk konstruksi sosial masyarakat Muslim abad pertengahan. Pendekatan semacam ini sejalan dengan diskursus dalam historiografi yang menempatkan sejarah sebagai ilmu sosial yang mengkaji kehidupan masyarakat masa lalu dengan memperhatikan konteks sosial budaya, bukan sekadar narasi faktual.

Dalam penelitian ini, data yang diperoleh bersumber dari dokumen historis primer dan sekunder. Sumber primer meliputi manuskrip klasik, kronik, arsip institusi pendidikan klasik, biografi ulama, serta dokumen sosial lainnya yang tersedia dalam bentuk tertulis. Data sekunder meliputi karya akademik kontemporer yang membahas peradaban Islam abad pertengahan dari berbagai disiplin ilmu seperti sejarah, sosiologi, antropologi, dan kajian peradaban Islam modern untuk memperkaya wawasan teoritis dan kontekstual. Penggunaan kedua jenis sumber ini dilakukan untuk memperluas jangkauan pengumpulan data sehingga memungkinkan triangulasi sumber dalam rangka meningkatkan validitas temuan penelitian.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) dan analisis dokumen historis. Studi kepustakaan dilakukan dengan mengidentifikasi, memilih, dan mengorganisir literatur yang relevan dengan tema penelitian dari jurnal ilmiah, monograf akademik, edisi kritis manuskrip, dan publikasi arsip yang terpercaya. Peneliti menelaah isi dokumen untuk melihat pola sosial, struktur hubungan kekuasaan, praktik budaya, serta dinamika masyarakat yang termuat dalam teks. Analisis dokumen historis dilakukan dengan cara membaca dan mencatat narasi, peristiwa, serta deskripsi sosial yang menunjukkan manifestasi kehidupan masyarakat Muslim abad pertengahan. Teknik ini sejalan dengan praktik umum dalam penelitian sejarah sosial yang menekankan interpretasi konteks, makna tindakan sosial, dan struktur sosial yang mendasari fenomena.

Proses analisis data dimulai sejak tahap pengumpulan data dan berlangsung secara berkelanjutan sepanjang penelitian, sesuai prinsip penelitian kualitatif yang tidak memisahkan antara pengumpulan dan analisis data. Analisis dilakukan dengan teknik narrative analysis dan content analysis historis, di mana data teks dianalisis untuk mengekstrak tema-tema sosial sentral yang berkaitan dengan struktur masyarakat, peran aktor sosial, praktik budaya, dan perubahan sosial dalam periode yang diteliti. Teknik content analysis historis memungkinkan peneliti menelaah makna implisit dan eksplisit dalam dokumen serta menghubungkan temuan empiris dengan pertanyaan penelitian secara sistematis. Setiap unit data teks dikodekan berdasarkan kategori konseptual yang berkaitan dengan aspek sosial yang dianalisis, kemudian disintesis menjadi narasi tematik yang menjawab fokus penelitian.

Dalam analisis ini, peneliti juga menerapkan kontekstualisasi historis, yaitu menempatkan data dalam konteks sosial, budaya, dan politik masa abad pertengahan yang relevan untuk menghindari pembacaan anachronistic atau interpretasi di luar konteks waktu dan ruang asal dokumen. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memahami motif, keyakinan, dan perilaku aktor sosial masa lalu dari sudut pandang mereka sendiri, sebagaimana ditekankan dalam historiografi kualitatif yang bersandar pada prinsip interpretatif dan hermeneutik. Peneliti juga secara kritis merefleksikan peran subjektivitasnya selama proses penelitian dengan menjaga reflektivitas ilmiah, yaitu kesadaran terhadap bias interpretatif yang mungkin muncul dari latar belakang peneliti. Hal ini penting dalam penelitian kualitatif karena peneliti tidak sekadar menjadi pengumpul data, tetapi juga interpreter utama yang memaknai data dalam kerangka teoritisnya. Reflektivitas dilaksanakan dengan mencatat asumsi awal, keputusan metodologis, serta perubahan fokus analisis yang terjadi sepanjang pengumpulan dan interpretasi data, serta dengan melibatkan literatur sekunder untuk memvalidasi interpretasi yang muncul.

Selain itu, penelitian ini memperhatikan etika penelitian sejarah dan sosial, terutama dalam hal pemilihan dan penggunaan sumber primer yang sensitif terhadap konteks budaya dan agama. Peneliti memastikan bahwa semua sumber tercatat secara akurat, menghormati hak cipta, serta memperlakukan artefak sejarah dengan penghormatan terhadap nilai budaya dan religius masyarakat asal dokumen. Etika ini penting untuk menjaga integritas ilmiah dan kepercayaan komunitas akademik terhadap penelitian sejarah sosial. Secara keseluruhan, metodologi penelitian ini dirancang untuk memungkinkan pemahaman multi-dimensional dan kontekstual terhadap peradaban Islam abad pertengahan melalui lensa sejarah sosial. Pendekatan kualitatif historis-sosial dipilih karena memberikan ruang bagi penafsiran makna sosial, bukan sekadar kronologi peristiwa, sehingga hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap kajian sejarah peradaban Islam serta menawarkan wawasan baru bagi studi sosial dan kultural di masa kini dan mendatang.

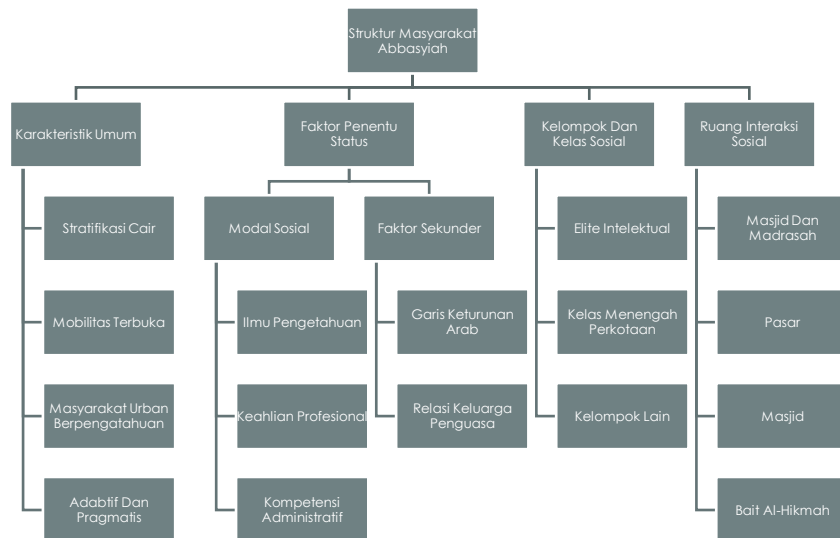
HASIL DAN PEMBAHASAN

Struktur Sosial Masyarakat Abbasiyah dalam Perspektif Sejarah Sosial.

Pendekatan sejarah sosial menempatkan masyarakat sebagai subjek utama dalam analisis sejarah, bukan semata-mata elit politik atau kronologi peristiwa.¹² Dalam konteks sejarah Islam klasik, pendekatan ini menjadi penting karena mampu mengungkap dinamika kehidupan sosial yang sering kali tersembunyi di balik narasi besar kekhalifahan, peperangan, dan pergantian dinasti. Sejarah sosial berupaya membaca bagaimana struktur masyarakat terbentuk, bagaimana relasi antar-kelompok berlangsung, serta bagaimana perubahan sosial terjadi sebagai respons terhadap perkembangan ekonomi, politik, dan intelektual. Dalam kerangka ini, masyarakat Abbasiyah tidak dipahami sebagai entitas pasif yang hanya menerima kebijakan negara,

¹² F Muftaza and N Aziz, 2025, "Social Transformation and Class Mobility in Abbasid Society" *Journal of Middle Eastern Studies*, 19, no. 1: hlm. 67-84, doi:10.1017/jmes.2025.018.

melainkan sebagai aktor aktif yang turut membentuk arah peradaban Islam abad pertengahan.



Berdasarkan beberapa temuan penelitian, masyarakat Islam pada masa Abbasiyah menunjukkan karakter stratifikasi sosial yang relatif cair, terutama jika dibandingkan dengan sistem feodal Eropa pada periode yang sama, di mana status sosial lebih ditentukan oleh kelahiran dan kepemilikan tanah. Struktur sosial Abbasiyah tidak sepenuhnya ditentukan oleh garis keturunan atau status aristokrasi yang kaku. Meskipun unsur genealogi terutama keturunan Arab dan relasi dengan keluarga penguasa masih memiliki pengaruh simbolik, faktor tersebut tidak secara mutlak menentukan posisi sosial seseorang. Mobilitas sosial tetap terbuka melalui berbagai jalur, seperti pendidikan, penguasaan ilmu pengetahuan, keahlian profesional, serta keterlibatan dalam birokrasi pemerintahan¹³.

Kondisi ini menunjukkan bahwa masyarakat Abbasiyah memiliki mekanisme internal yang memungkinkan terjadinya pergerakan vertikal dalam struktur sosial. Individu dari latar belakang non-Arab, mawali, bahkan dari kelompok minoritas agama, dapat memperoleh posisi sosial yang terhormat apabila memiliki kapasitas intelektual dan keterampilan yang dibutuhkan oleh negara maupun masyarakat. Dengan demikian, struktur sosial Abbasiyah tidak bersifat tertutup, melainkan menunjukkan kecenderungan adaptif dan pragmatis sesuai dengan kebutuhan zaman. Dalam perspektif sejarah sosial, stratifikasi masyarakat Abbasiyah dapat dipahami sebagai hasil interaksi antara tradisi Arab-Islam awal, realitas multikultural wilayah kekuasaan Abbasiyah, serta tuntutan administratif dan intelektual dari sebuah imperium besar.

¹³ Haidar Putra Daulay et al., 2021, "Peradaban Dan Pemikiran Islam Pada Masa Bani Abbasiyah Islamic Civilization and Thought in the Abbasid Period," 1, no. 2: hlm. 228-44.

Kekhalifahan Abbasiyah membentang dari Afrika Utara hingga Asia Tengah, mencakup beragam etnis, bahasa, dan tradisi sosial. Keberagaman ini menuntut adanya sistem sosial yang relatif fleksibel agar stabilitas politik dan integrasi sosial dapat terjaga. Oleh karena itu, keterbukaan terhadap kontribusi non-Arab dan non-elite menjadi salah satu ciri penting masyarakat Abbasiyah¹⁴.

Salah satu aspek sentral dalam struktur sosial Abbasiyah adalah peran ilmu pengetahuan sebagai modal sosial, yang berfungsi sebagai sumber legitimasi status dan otoritas sosial di ruang publik perkotaan. Dalam masyarakat Abbasiyah, ilmu tidak hanya dipandang sebagai sarana spiritual atau keagamaan, tetapi juga sebagai instrumen mobilitas sosial dan legitimasi status. Ulama, ilmuwan, filsuf, dokter, ahli matematika, dan penerjemah menempati posisi sosial yang relatif tinggi, terutama di pusat-pusat perkotaan seperti Baghdad¹⁵. Kota ini berkembang bukan hanya sebagai pusat pemerintahan, tetapi juga sebagai pusat intelektual dan budaya yang menarik para cendekiawan dari berbagai wilayah. Fenomena ini menunjukkan bahwa peradaban Islam pada masa Abbasiyah tidak bersifat statis atau eksklusif. Sebaliknya, ia bersifat dinamis dan terbuka terhadap inovasi. Penerjemahan karya-karya Yunani, Persia, dan India ke dalam bahasa Arab menjadi salah satu fondasi penting bagi perkembangan ilmu pengetahuan. Para penerjemah, yang banyak di antaranya berasal dari kalangan non-Muslim, seperti Kristen Nestorian dan penganut agama lain, memperoleh kedudukan sosial yang signifikan karena keahlian mereka sangat dibutuhkan oleh negara dan komunitas intelektual.

Dari sudut pandang sejarah sosial, keberadaan kelompok profesional berbasis ilmu pengetahuan ini mencerminkan transformasi struktur sosial masyarakat Abbasiyah. Masyarakat yang sebelumnya lebih bercorak tradisional dan berbasis ikatan kesukuan secara bertahap bergerak menuju masyarakat urban yang ditandai oleh spesialisasi kerja, diferensiasi sosial, dan penghargaan terhadap kompetensi. Proses urbanisasi yang pesat di wilayah Abbasiyah memperkuat posisi kelompok profesional ini dalam struktur sosial, sekaligus mengurangi dominasi elite tradisional berbasis keturunan semata. Selain kelompok ilmuwan dan cendekiawan, birokrasi pemerintahan juga menjadi saluran penting bagi mobilitas sosial, khususnya bagi kelompok mawali dan non-Arab Muslim yang memiliki kompetensi administratif dan literasi tinggi. Administrasi Abbasiyah membutuhkan aparatur yang cakap dalam bidang administrasi, keuangan, hukum, dan diplomasi. Kebutuhan ini membuka peluang bagi individu-individu berbakat dari berbagai latar belakang sosial

¹⁴ Ahmad Palihin et al., 2025, "Sejarah Dinasti Abbasiyah Perkembangan Pendidikan Islam Modern," 6, no. 1: hlm. 225-36.

¹⁵ Ahmad Junizar and Rifdah Meidianty, 2026, "Relasi Ulama Dan Penguasa Pada Masa Kejayaan ' Golden Age ' Dinasti Abbasiyah Dalam Memajukan Ilmu Pengetahuan."

untuk berpartisipasi dalam pemerintahan. Dalam banyak kasus, kemampuan teknis dan loyalitas lebih diutamakan daripada asal-usul etnis atau status keluarga, meskipun praktik ini tentu tidak sepenuhnya menghapus diskriminasi sosial yang ada.¹⁶

Struktur sosial masyarakat Abbasiyah juga ditandai oleh keberadaan kelas menengah perkotaan yang cukup kuat. Kelompok ini terdiri atas pedagang, pengrajin, profesional, dan pegawai administrasi yang memiliki tingkat kesejahteraan relatif stabil. Kelas menengah ini berperan penting dalam menopang kehidupan ekonomi dan sosial kota-kota besar Abbasiyah. Dari perspektif sejarah sosial, keberadaan kelas menengah yang kuat menunjukkan tingkat kompleksitas sosial yang tinggi serta adanya distribusi peran sosial yang lebih beragam dibandingkan masyarakat agraris tradisional.¹⁷

Dalam kehidupan sehari-hari, interaksi antar-kelompok sosial di masyarakat Abbasiyah berlangsung dalam berbagai ruang sosial, seperti pasar, masjid, madrasah, dan majelis ilmu. Ruang-ruang ini menjadi arena pertukaran ide, nilai, dan kepentingan yang turut membentuk dinamika sosial. Masjid, misalnya, tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai pusat pendidikan dan diskusi intelektual. Melalui ruang-ruang sosial ini, batas-batas sosial menjadi relatif lebih cair, memungkinkan terjadinya interaksi lintas kelas dan latar belakang. Dari perspektif sejarah sosial, penting untuk dicatat bahwa keterbukaan struktur sosial Abbasiyah tidak berarti absennya hierarki atau ketimpangan. Masyarakat Abbasiyah tetap mengenal perbedaan status antara elite politik, elite intelektual, kelas menengah, dan kelompok bawah. Namun, yang membedakan Abbasiyah dari banyak masyarakat feodal sezamannya adalah adanya mekanisme yang memungkinkan individu berpindah dari satu lapisan sosial ke lapisan lainnya. Mobilitas ini, meskipun tidak selalu mudah atau merata, tetap menjadi ciri penting dari struktur sosial Abbasiyah.

Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa dinamika peradaban Islam abad pertengahan dibentuk oleh interaksi kompleks antara kebijakan politik, kebutuhan sosial, dan perkembangan intelektual. Negara membutuhkan legitimasi dan stabilitas, masyarakat membutuhkan ruang untuk berkembang, dan ilmu pengetahuan menyediakan sarana untuk menjembatani keduanya. Dalam konteks ini, struktur sosial Abbasiyah dapat dipahami sebagai produk dari negosiasi berkelanjutan antara berbagai kepentingan dan aktor sosial. Lebih jauh, pendekatan sejarah sosial memungkinkan kita melihat bahwa agama, meskipun merupakan elemen penting dalam kehidupan masyarakat Abbasiyah,

¹⁶ Muhammad Izzat Ramadhan and Andi Abdul Hamzah, 2025, "Ajamiy : Jurnal Bahasa Dan Sastra Arab Abad Keemasan Islam : Periode Abbasiyah Sebagai Zaman Keemasan Sastra Arab," 14, no. 2: hlm. 636-53.

¹⁷ S Ningrum et al., 2022, "Nasab Verification and Inheritance Disputes in Indonesian Religious Courts" *Indonesian Journal of Family Law*, 7, no. 2: hlm. 110-28.

bukanlah satu-satunya faktor penentu struktur sosial. Praktik sosial, kebutuhan ekonomi, dan perkembangan ilmu pengetahuan memiliki peran yang sama pentingnya dalam membentuk relasi sosial. Dengan demikian, masyarakat Abbasiyah tidak dapat direduksi menjadi sekadar masyarakat religius, melainkan harus dipahami sebagai masyarakat kompleks dengan beragam dimensi sosial. Transformasi struktur sosial dari masyarakat tradisional menuju masyarakat urban berpengetahuan pada masa Abbasiyah juga memiliki implikasi jangka panjang bagi sejarah Islam, terutama dalam pembentukan institusi pendidikan formal dan budaya intelektual Islam klasik.¹⁸ Tradisi penghargaan terhadap ilmu pengetahuan dan kompetensi profesional yang berkembang pada masa ini menjadi fondasi bagi perkembangan institusi pendidikan Islam, seperti madrasah, perpustakaan, dan bait al-hikmah. Institusi-institusi ini tidak hanya berfungsi sebagai pusat transmisi ilmu, tetapi juga sebagai mekanisme reproduksi sosial yang memungkinkan generasi berikutnya memperoleh akses terhadap status sosial melalui pendidikan.

Dalam kerangka sejarah sosial, dapat disimpulkan bahwa struktur sosial masyarakat Abbasiyah mencerminkan tingkat adaptabilitas yang tinggi terhadap perubahan sosial dan intelektual. Keterbukaan terhadap mobilitas sosial, penghargaan terhadap ilmu pengetahuan, serta integrasi berbagai kelompok etnis dan agama menunjukkan bahwa peradaban Abbasiyah memiliki kapasitas untuk mengelola kompleksitas sosial secara relatif efektif. Meskipun tidak lepas dari konflik dan ketimpangan, struktur sosial ini tetap menjadi salah satu faktor kunci yang menjelaskan kemajuan peradaban Islam pada abad pertengahan. Dengan demikian, analisis struktur sosial masyarakat Abbasiyah melalui perspektif sejarah sosial memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang bagaimana peradaban Islam berkembang tidak hanya melalui kekuasaan politik, tetapi juga melalui dinamika kehidupan masyarakat sehari-hari. Pendekatan ini menegaskan bahwa masyarakat, dengan segala kompleksitas dan interaksinya, merupakan motor utama perubahan sejarah, termasuk dalam konteks kekhalifahan Abbasiyah.

Kekuasaan Politik sebagai Faktor Sosial dalam Produksi Pengetahuan.

kekuasaan politik pada masa Abbasiyah memainkan peran krusial dalam membentuk iklim sosial yang kondusif bagi perkembangan intelektual. Namun, dalam pendekatan sejarah sosial, kekuasaan tersebut tidak dipahami semata-mata sebagai instrumen dominasi atau kontrol negara atas masyarakat, melainkan sebagai mekanisme fasilitasi sosial yang memungkinkan terjadinya interaksi produktif antara negara dan komunitas intelektual. Kekuasaan politik

¹⁸ R Ifendi, 2020, "Education and Intellectual Life in the Abbasid Caliphate" *Journal of Historical Inquiry*, 5, no. 3: hlm. 33-49, doi:10.1007/jhi.v5i3.4021.

berfungsi menciptakan kondisi struktural baik melalui stabilitas, patronase, maupun legitimasi simbolik yang mendukung berlangsungnya aktivitas keilmuan secara berkelanjutan.¹⁹

Khalifah seperti Harun al-Rashid dan al-Ma'mun dapat dipahami sebagai aktor sosial yang berperan aktif dalam pembentukan ruang sosial bagi produksi pengetahuan. Dukungan mereka terhadap kegiatan penerjemahan, diskusi ilmiah, dan riset tidak hanya mencerminkan preferensi pribadi, tetapi juga kebutuhan sosial dan politik negara Abbasiyah akan pengetahuan sebagai basis administrasi, hukum, dan legitimasi kekuasaan. Dalam konteks ini, kekuasaan politik tidak berdiri di luar masyarakat, melainkan menjadi bagian dari jaringan sosial yang menopang perkembangan intelektual. Dukungan negara terhadap kegiatan penerjemahan dan riset menghasilkan dampak sosial yang melampaui ranah akademik. Aktivitas keilmuan menciptakan ekosistem sosial baru yang berbasis literasi, rasionalitas, dan pertukaran gagasan. Ilmu pengetahuan tidak lagi menjadi praktik elitis yang terisolasi, tetapi terintegrasi ke dalam kehidupan sosial perkotaan melalui majelis ilmu, institusi pendidikan, dan ruang publik lainnya. Kondisi ini menunjukkan bahwa kebijakan politik memiliki implikasi langsung terhadap pembentukan budaya intelektual masyarakat²⁰.

Dalam perspektif sejarah sosial, negara Abbasiyah dapat dipahami sebagai agen sosial yang mempengaruhi arah perkembangan peradaban melalui kebijakan pengetahuannya. Kebijakan politik yang mendukung ilmu pengetahuan menghasilkan konsekuensi sosial berupa meningkatnya status sosial ilmuwan, terbentuknya komunitas akademik yang relatif otonom, serta berkembangnya budaya diskusi dan debat ilmiah di ruang. Otoritas ilmuwan dalam masyarakat tidak semata bersumber dari kedekatan dengan penguasa, tetapi dari pengakuan sosial atas kompetensi intelektual mereka. Dengan demikian, hubungan antara kekuasaan dan ilmu pengetahuan pada masa Abbasiyah bersifat simbiotik. Kekuasaan menyediakan sumber daya dan legitimasi, sementara ilmu pengetahuan memberikan rasionalitas dan otoritas simbolik bagi negara. Relasi ini berkontribusi dalam membentuk struktur sosial peradaban Islam abad pertengahan yang relatif stabil, adaptif, dan berorientasi pada pengembangan pengetahuan²¹.

Bait al-Hikmah sebagai Ruang Sosial dan Simbol Peradaban

Dalam pendekatan sejarah sosial, institusi tidak dipahami semata-mata sebagai bangunan fisik atau perangkat administratif negara, melainkan sebagai ruang sosial tempat berlangsungnya interaksi antarkelompok, produksi makna

¹⁹ Romadhan Siregar et al., n.d., "Pemikiran Politik Pada Masa Dinasti Umayyah Dan Abbasiyah," 7: hlm. 108–23.

²⁰ Siti Masruroh, 2021, "Peradaban Masa Harun Ar Rasyid Pada Dinasti Abbasiyah," 9: hlm. 82–93.

²¹ Benies Husaeni et al., "KEMAJUAN ILMU PENGETAHUAN DI ERA DINASTI" n.d., hlm. 262–69.

kolektif, serta pembentukan identitas sosial suatu masyarakat. Institusi berfungsi sebagai arena di mana relasi kekuasaan, pengetahuan, dan budaya saling berkelindan dan membentuk struktur sosial yang lebih luas. Dalam konteks peradaban Islam klasik, Bait al-Hikmah, sebagaimana dijelaskan oleh Hasanah dalam penelitiannya, merupakan contoh representatif institusi yang memiliki fungsi sosial-kultural yang kompleks, melampaui perannya sebagai perpustakaan atau lembaga pendidikan formal²².

Bait al-Hikmah tidak hanya menjadi tempat penyimpanan dan penerjemahan manuskrip, tetapi juga berperan sebagai ruang perjumpaan sosial bagi berbagai kelompok intelektual. Di dalamnya berkumpul penerjemah, ilmuwan, filsuf, penulis, dan pelajar dari beragam latar belakang etnis dan agama, termasuk Muslim dan non-Muslim. Keberagaman ini mencerminkan karakter kosmopolitan masyarakat Abbasiyah, khususnya di Baghdad sebagai pusat urban yang berkembang pesat dan menjadi simpul peradaban Islam abad pertengahan. Interaksi lintas identitas tersebut memungkinkan terbentuknya pola relasi sosial yang relatif inklusif dan berbasis kompetensi intelektual. Dalam perspektif sejarah sosial, interaksi yang berlangsung di Bait al-Hikmah melahirkan komunitas epistemik, yakni kelompok sosial yang disatukan oleh kepentingan bersama terhadap produksi, pengembangan, dan penyebaran pengetahuan. Komunitas ini tidak terikat secara ketat oleh batas etnis, agama, atau asal-usul sosial, melainkan oleh otoritas keilmuan dan kontribusi intelektual. Dengan demikian, Bait al-Hikmah berfungsi sebagai mekanisme sosial yang memperkuat mobilitas simbolik, di mana status sosial individu dapat meningkat melalui pencapaian intelektual²³.

Lebih jauh, Bait al-Hikmah merepresentasikan ruang sosial di mana produksi pengetahuan berlangsung sebagai praktik kolektif, bukan aktivitas individual yang terisolasi. Kegiatan penerjemahan karya-karya Yunani, Persia, dan India ke dalam bahasa Arab tidak hanya mencerminkan minat intelektual, tetapi juga kebutuhan sosial dan politik masyarakat Abbasiyah akan legitimasi ilmiah dan rasionalitas administrasi. Dalam proses ini, pengetahuan asing tidak diterima secara pasif, melainkan ditafsirkan dan diintegrasikan ke dalam kerangka intelektual Islam, sehingga melahirkan sintesis budaya yang khas. Keberadaan Bait al-Hikmah juga menunjukkan bahwa peradaban Islam abad pertengahan memiliki mekanisme sosial yang efektif untuk mengelola perbedaan. Dari perspektif sejarah sosial, institusi ini dapat dipahami sebagai bentuk institusionalisasi toleransi intelektual, di mana perbedaan pandangan filosofis, metodologis, dan teologis tidak dipadamkan, tetapi dikelola melalui

²² Lutfi Putra Mahesa, 2023, "Manajemen Perpustakaan Baitul Hikmah Pada Masa Bani Abbasiyah," 3, no. 2: hlm. 1–10.

²³ Moh Khusnul Abid, 2022, "Peran Baitul Hikmah Dalam Mengembangkan Pendidikan Islam Pada Masa Dinasti Abbasiyah," 3, no. 2: hlm. 62–72.

dialog dan debat rasional. Praktik diskusi ilmiah dan kritik teks yang berkembang di dalamnya mencerminkan budaya intelektual yang menempatkan rasionalitas sebagai nilai sosial penting dalam masyarakat Abbasiyah²⁴.

Dampak sosial Bait al-Hikmah tidak terbatas pada kalangan elite intelektual. Keberadaan institusi ini berkontribusi terhadap meningkatnya literasi masyarakat urban, berkembangnya tradisi penulisan ilmiah, serta terbentuknya jaringan intelektual lintas wilayah yang melampaui batas geografis kekhalifahan Abbasiyah. Jaringan ini memperkuat kohesi sosial komunitas ilmiah Islam klasik sekaligus mempercepat difusi pengetahuan. Dengan demikian, Bait al-Hikmah bukan hanya simbol kejayaan intelektual Islam, tetapi juga fondasi sosial peradaban Abbasiyah. Dalam kerangka sejarah sosial, institusi ini merefleksikan hubungan erat antara pengetahuan, kekuasaan, dan struktur sosial, serta menunjukkan bagaimana ruang intelektual dapat berfungsi sebagai agen transformasi sosial dalam peradaban Islam abad pertengahan.²⁵

Ilmu Pengetahuan sebagai Praktik Sosial dalam Peradaban Islam Abad Pertengahan.

Dalam perspektif sejarah sosial, pendekatan ini menempatkan ilmu pengetahuan sebagai bagian dari struktur sosial yang hidup dan dinamis. Ilmu tidak berdiri di luar masyarakat, melainkan beroperasi di dalam jaringan relasi sosial yang melibatkan kekuasaan, ekonomi, budaya, dan institusi. Produksi ilmu pada masa Abbasiyah bergantung pada keberadaan ruang sosial tertentu, seperti masjid, madrasah, majelis ilmu, dan institusi intelektual seperti Bait al-Hikmah, yang memungkinkan terjadinya interaksi antarpelaku pengetahuan. Sebagai praktik sosial, ilmu pengetahuan berfungsi sebagai mekanisme integrasi sosial. Melalui keterlibatan dalam aktivitas keilmuan baik sebagai pengajar, pelajar, penyalin, maupun penerjemah berbagai kelompok masyarakat dapat berpartisipasi dalam proyek peradaban yang sama, meskipun memiliki latar belakang etnis, sosial, dan agama yang berbeda. Kondisi ini mencerminkan karakter inklusif masyarakat Abbasiyah, di mana kompetensi intelektual menjadi salah satu dasar legitimasi sosial.

Dari sudut pandang sejarah sosial, keterlibatan kolektif dalam produksi ilmu menciptakan apa yang dapat disebut sebagai ekosistem pengetahuan. Ekosistem ini mencakup relasi timbal balik antara individu, komunitas ilmiah, dan institusi sosial. Ilmuwan tidak bekerja secara soliter, melainkan bergantung

²⁴ Received Mei et al., 2025, "Hasil Penelitian Ini Menunjukkan Bahwa Kemajuan Dan Perkembangan Perpustakaan Terjadi Pada Masa Khalifah Harun Ar-Rasyid Dan Al-Makmum Yang Menjadikan Bayt Al-Hikmah Sebagai," 8, no. 5.

²⁵ H Daulay et al., 2021, "Social Historiography in Islamic Civilization Studies" *Journal of Islamic History Studies*, 8, no. 2: hlm. 45-63, doi:10.1234/jihs.v8i2.9876.

pada jaringan murid, kolega, dan patron yang memungkinkan keberlanjutan aktivitas keilmuan. Dengan demikian, ilmu pengetahuan pada masa Abbasiyah dapat dipahami sebagai praktik sosial yang direproduksi secara kolektif lintas generasi.²⁶

Transformasi ini memiliki implikasi sosial yang luas. Ilmu pengetahuan tidak hanya berkembang dalam ranah akademik, tetapi juga meresap ke dalam berbagai aspek kehidupan sosial masyarakat Islam abad pertengahan. Dalam bidang keagamaan, ilmu berperan dalam pembentukan mazhab fikih, metodologi tafsir, dan tradisi hadis. Dalam bidang hukum, penguasaan ilmu menjadi dasar legitimasi otoritas qadhi dan aparat peradilan. Sementara itu, dalam administrasi pemerintahan, ilmu matematika, astronomi, dan geografi mendukung pengelolaan negara secara lebih rasional dan sistematis. Dalam konteks ini, ilmu pengetahuan berfungsi sebagai modal sosial yang memiliki nilai strategis dalam struktur masyarakat Abbasiyah. Individu yang menguasai ilmu tertentu memperoleh pengakuan sosial, akses terhadap posisi strategis, serta peluang mobilitas sosial. Fenomena ini menunjukkan bahwa masyarakat Abbasiyah mengembangkan sistem stratifikasi sosial yang relatif terbuka, di mana status tidak sepenuhnya ditentukan oleh garis keturunan, tetapi juga oleh pencapaian intelektual.

Lebih jauh, praktik keilmuan sebagai aktivitas sosial turut membentuk budaya literasi masyarakat urban. Tradisi penulisan, penyalinan, dan penyebaran manuskrip menciptakan lingkungan sosial yang menghargai teks dan argumen rasional. Buku tidak hanya menjadi media penyimpanan ilmu, tetapi juga sarana komunikasi sosial yang memungkinkan pertukaran gagasan lintas wilayah. Dalam jangka panjang, budaya literasi ini memperkuat kohesi sosial komunitas intelektual Islam klasik dan memperluas jangkauan pengaruh ilmu pengetahuan. Dalam perspektif sejarah sosial, penting pula dicatat bahwa praktik keilmuan pada masa Abbasiyah tidak lepas dari relasi kekuasaan. Dukungan politik terhadap kegiatan ilmiah seperti patronase khalifah dan elite birokrasi menciptakan kondisi struktural yang memungkinkan ilmu berkembang. Namun, relasi ini tidak bersifat satu arah. Ilmu pengetahuan juga berperan dalam memperkuat legitimasi kekuasaan dengan menyediakan dasar rasional bagi kebijakan publik, hukum, dan administrasi negara. Dengan demikian, hubungan antara ilmu dan kekuasaan bersifat simbiotik dalam kerangka sosial masyarakat Abbasiyah.

Sebagai praktik sosial, ilmu pengetahuan juga berfungsi sebagai sarana pembentukan identitas kolektif. Komunitas ilmiah Islam klasik membangun identitas bersama melalui bahasa Arab sebagai *lingua franca* keilmuan,

²⁶ M Husean Ali and R Jasim, 2025, "Intellectual Institutions and Social Mobility in Medieval Islam" *Al-Tarikh Journal*, 12, no. 1: hlm. 55-74, doi:10.5554/altarikh.v12i1.2025.

metodologi ilmiah yang relatif seragam, serta etos pencarian ilmu sebagai nilai sosial dan religius. Identitas ini melampaui batas geografis dan politik, menciptakan apa yang dapat disebut sebagai komunitas pengetahuan transregional dalam dunia Islam abad pertengahan. Dalam kerangka sejarah sosial, praktik keilmuan pada masa Abbasiyah juga berperan sebagai mekanisme diferensiasi sosial yang bersifat produktif. Diferensiasi ini tidak semata-mata memecah masyarakat ke dalam hierarki yang kaku, tetapi justru menciptakan pembagian peran sosial yang memungkinkan sistem sosial berfungsi secara lebih kompleks. Ilmuwan, ulama, penulis, dan administrator berbasis ilmu menempati posisi sosial tertentu yang diakui secara luas, baik oleh negara maupun masyarakat, karena kontribusi mereka terhadap stabilitas dan kemajuan peradaban. Dalam masyarakat Abbasiyah, proses sosialisasi ilmu berlangsung secara berlapis. Pendidikan informal melalui majelis ilmu, halaqah masjid, dan relasi guru-murid berjalan berdampingan dengan institusi formal seperti madrasah dan pusat penerjemahan. Proses ini membentuk habitus keilmuan, yaitu pola pikir dan praktik sosial yang menempatkan pencarian ilmu sebagai aktivitas bernilai tinggi secara moral dan sosial. Habitus ini tidak hanya membentuk individu terpelajar, tetapi juga menciptakan lingkungan sosial yang mendukung keberlanjutan aktivitas keilmuan lintas generasi.

Lebih jauh, ilmu pengetahuan sebagai praktik sosial turut memengaruhi pola relasi kekuasaan dalam masyarakat Abbasiyah. Meskipun kekuasaan politik tetap berada di tangan khalifah dan elite birokrasi, otoritas simbolik sering kali dimiliki oleh kelompok ilmuwan dan ulama. Otoritas ini bersumber dari penguasaan ilmu yang diakui secara sosial, sehingga memungkinkan terjadinya negosiasi antara kekuasaan politik dan kekuasaan intelektual. Dalam banyak kasus, legitimasi kebijakan negara diperkuat melalui dukungan ilmuwan, sementara ilmuwan memperoleh perlindungan dan sumber daya dari negara. Dari perspektif sejarah sosial, relasi ini menunjukkan bahwa ilmu pengetahuan berfungsi sebagai mediator sosial antara negara dan masyarakat. Ilmu menjadi bahasa bersama yang memungkinkan komunikasi antara kepentingan politik dan kebutuhan sosial. Dalam bidang hukum, misalnya, kodifikasi fikih dan pengembangan metodologi ijtihad mencerminkan upaya mengintegrasikan nilai-nilai normatif Islam dengan realitas sosial yang terus berubah. Proses ini menegaskan bahwa ilmu bukan hanya refleksi realitas sosial, tetapi juga alat untuk membentuk dan mengarahkan perubahan sosial.

Praktik keilmuan kolektif juga berdampak pada perluasan jaringan sosial masyarakat Abbasiyah. Jaringan intelektual yang terbentuk melalui perjalanan ilmiah (rihlah ilmiah), korespondensi antarsarjana, dan pertukaran manuskrip menciptakan struktur sosial transregional. Struktur ini menghubungkan pusat-pusat ilmu di Baghdad, Damaskus, Kairo, dan Andalusia, sehingga memperkuat kohesi sosial dunia Islam klasik. Dalam konteks ini, ilmu pengetahuan berfungsi

sebagai perekat sosial yang melampaui batas geografis dan politik. Dampak sosial lain dari ilmu sebagai praktik kolektif adalah terbentuknya etos rasionalitas dalam kehidupan masyarakat urban. Etos ini tercermin dalam kecenderungan untuk mengedepankan argumen, evidensi, dan diskusi terbuka dalam menyelesaikan persoalan sosial dan intelektual. Budaya debat ilmiah yang berkembang di majelis ilmu dan institusi pendidikan mencerminkan internalisasi nilai-nilai rasional dalam struktur sosial masyarakat Abbasiyah, Nilai ini tidak menggantikan agama, tetapi justru berdialog dengannya dalam membentuk kerangka berpikir masyarakat.²⁷

Dalam perspektif sejarah sosial, penting untuk dicatat bahwa praktik keilmuan ini tidak sepenuhnya bebas dari konflik. Perbedaan mazhab, aliran teologi, dan orientasi filosofis sering kali memunculkan ketegangan sosial. Namun, keberadaan ruang sosial yang menampung perbedaan tersebut seperti majelis diskusi dan institusi pendidikan menunjukkan bahwa masyarakat Abbasiyah memiliki mekanisme sosial untuk mengelola konflik secara relatif konstruktif. Konflik intelektual tidak selalu dipahami sebagai ancaman, melainkan sebagai bagian dari dinamika sosial yang produktif. Ilmu pengetahuan sebagai praktik sosial juga berkontribusi terhadap perubahan struktur ekonomi masyarakat Abbasiyah. Aktivitas penyalinan manuskrip, perdagangan buku, dan patronase keilmuan menciptakan sektor ekonomi berbasis pengetahuan. Sektor ini menyediakan mata pencaharian bagi penyalin, penjual buku, dan pengajar, sehingga memperluas basis ekonomi masyarakat urban. Dengan demikian, ilmu pengetahuan tidak hanya berdampak pada ranah simbolik, tetapi juga pada struktur ekonomi dan kesejahteraan sosial.

Dalam jangka panjang, integrasi ilmu ke dalam kehidupan sosial menghasilkan transformasi budaya yang signifikan. Tradisi ilmiah tertulis memperkuat ingatan kolektif masyarakat dan memungkinkan akumulasi pengetahuan secara berkelanjutan. Akumulasi ini menjadi salah satu faktor utama yang menjelaskan daya tahan dan pengaruh peradaban Islam abad pertengahan dalam sejarah global.

Oleh karena itu, membaca ilmu pengetahuan sebagai praktik sosial memungkinkan kita memahami peradaban Islam abad pertengahan secara lebih holistik. Kemajuan intelektual tidak muncul secara tiba-tiba atau berdiri sendiri, melainkan merupakan hasil dari konfigurasi sosial yang kompleks. Konfigurasi ini mencakup relasi kekuasaan, institusi pendidikan, jaringan sosial, serta nilai-nilai budaya yang menempatkan ilmu sebagai elemen sentral dalam kehidupan masyarakat. Dengan demikian, reinterpretasi peradaban Islam abad pertengahan melalui lensa sejarah sosial menegaskan bahwa apa yang sering

²⁷ A Gunawan et al., 2025, "Knowledge, Power, and Society in the Abbasid Era" *Islamic Social Research Journal*, 11, no. 1: hlm. 23-41, doi:10.7890/isrj.v11i1.2034.

disebut sebagai zaman keemasan sesungguhnya adalah hasil dari proses sosial yang panjang dan berlapis. Ilmu pengetahuan, sebagai praktik sosial kolektif, menjadi salah satu pilar utama yang menopang proses tersebut. Perspektif ini tidak hanya memperkaya pemahaman historis, tetapi juga memberikan kerangka analitis untuk membaca hubungan antara ilmu, masyarakat, dan kekuasaan dalam konteks peradaban lain.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa peradaban Islam abad pertengahan, khususnya pada masa Abbasiyah, tidak dapat dipahami secara utuh apabila hanya dilihat melalui narasi politik dan capaian intelektual elite semata. Melalui pendekatan sejarah sosial, kajian ini menegaskan bahwa masyarakat merupakan aktor utama dalam proses pembentukan dan transformasi peradaban. Struktur sosial masyarakat Abbasiyah ditandai oleh tingkat mobilitas sosial yang relatif terbuka, penghargaan terhadap ilmu pengetahuan sebagai modal sosial, serta integrasi berbagai kelompok etnis dan agama dalam kehidupan sosial perkotaan. Temuan ini memperkuat argumen bahwa kemajuan peradaban Islam abad pertengahan merupakan hasil interaksi kompleks antara struktur sosial, institusi, dan praktik kehidupan sehari-hari masyarakat. Hasil penelitian juga memperlihatkan bahwa kekuasaan politik Abbasiyah berperan sebagai fasilitator sosial dalam produksi dan distribusi pengetahuan. Dukungan negara terhadap kegiatan keilmuan tidak hanya mendorong perkembangan ilmu pengetahuan, tetapi juga membentuk ekosistem sosial berbasis literasi, rasionalitas, dan diskursus intelektual. Dalam konteks ini, hubungan antara ilmu pengetahuan dan kekuasaan bersifat simbiotik, di mana keduanya saling memperkuat dalam membangun legitimasi sosial dan stabilitas peradaban.

Lebih lanjut, kajian ini menempatkan Bait al-Hikmah sebagai ruang sosial yang merepresentasikan institusionalisasi praktik keilmuan kolektif dan toleransi intelektual. Institusi ini berfungsi sebagai arena interaksi lintas identitas, pembentukan komunitas epistemik, serta pengelolaan perbedaan secara produktif. Dampak sosialnya tercermin dalam berkembangnya budaya literasi, jaringan intelektual transregional, dan transformasi struktur sosial menuju masyarakat urban berpengetahuan. Dengan demikian, Bait al-Hikmah tidak hanya menjadi simbol kejayaan intelektual, tetapi juga fondasi sosial peradaban Islam abad pertengahan.

Dari sisi teoretis, penelitian ini berkontribusi pada pengayaan historiografi peradaban Islam dengan menegaskan relevansi pendekatan sejarah sosial dalam membaca ulang masa lalu Islam secara lebih inklusif dan kontekstual. Integrasi antara teori sosial modern dan tradisi pemikiran Islam klasik memungkinkan analisis yang lebih komprehensif terhadap relasi antara struktur, agensi, dan praktik sosial. Secara praktis, temuan penelitian ini

memberikan perspektif alternatif bagi pengembangan pendidikan sejarah Islam agar tidak terjebak dalam pendekatan normatif dan elitis, tetapi mendorong pemahaman kritis terhadap dinamika sosial peradaban. Dari sisi kebijakan, hasil kajian ini menegaskan pentingnya dukungan institusional terhadap pengembangan ilmu pengetahuan dan ruang dialog intelektual sebagai prasyarat bagi kemajuan masyarakat yang plural dan berpengetahuan.

Penelitian ini memiliki keterbatasan karena berfokus pada analisis historis berbasis sumber tertulis dan belum secara mendalam membandingkan dinamika sosial Abbasiyah dengan wilayah Islam lain seperti Andalusia atau dunia Islam Timur. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk mengembangkan studi komparatif lintas wilayah atau mengkaji pengalaman kelompok sosial yang masih kurang tereksplorasi, seperti perempuan dan komunitas non-elite, guna memperluas pemahaman tentang keragaman pengalaman sosial dalam peradaban Islam abad pertengahan. Dengan demikian, kajian sejarah sosial tidak hanya berfungsi sebagai rekonstruksi masa lalu, tetapi juga sebagai sumber refleksi kritis bagi pembangunan peradaban di masa kini dan mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

- Abid, Moh Khusnul. 2022, "Peran Baitul Hikmah Dalam Mengembangkan Pendidikan Islam Pada Masa Dinasti Abbasiyah" 3, no. 2, 62-72.
- Azqia, Alya Hasya, and Tenny Sudjatnika. 2025, "Peran Madrasah Dan Waqaf Dalam Pembentukan Masyarakat Ilmiah Pada Masa Keemasan Islam" 1, no. 4, 2252-66.
- Daulay, H, N Rahman, and A Yusuf. 2021, "Social Historiography in Islamic Civilization Studies." *Journal of Islamic History Studies* 8, no. 2, 45-63: doi:10.1234/jihs.v8i2.9876.
- Daulay, Haider Putra, Zaini Dahlan, and Yumita Anisa Putri. 2021, "Peradaban Dan Pemikiran Islam Pada Masa Bani Abbasiyah Islamic Civilization and Thought in the Abbasid Period" 1, no. 2, 228-44.
- Elvan, Nola Ariesta, and Duski Samad. 2024, "Sejarah Pendidikan Islam Dari Klasik , Pertengahan , Dan Modern" 1, 130-40.
- Gunawan, A, T Siregar, and R Wibowo. 2025, "Knowledge, Power, and Society in the Abbasid Era." *Islamic Social Research Journal* 11, no. 1, 23-41: doi:10.7890/isrj.v11i1.2034.
- Husaeni, Benies, Euis Ismayati Yuniar, Wicka Yunita, Dwi Utami, Lulu Siti Nuraini, Fakultas Agama, and Islam Universitas. "KEMAJUAN ILMU PENGETAHUAN DI ERA DINASTI" n.d. 262-69.
- Husean Ali, M, and R Jasim. 2025, "Intellectual Institutions and Social Mobility in Medieval Islam." *Al-Tarikh Journal* 12, no. 1, 55-74: doi:10.5554/altarikh.v12i1.2025.
- Ifendi, R. 2020, "Education and Intellectual Life in the Abbasid Caliphate." *Journal of Historical Inquiry* 5, no. 3, 33-49: doi:10.1007/jhi.v5i3.4021.
- Junizar, Ahmad, and Rifdah Meidianty. 2026, "Relasi Ulama Dan Penguasa Pada

- Masa Kejayaan ' Golden Age ' Dinasti Abbasiyah Dalam Memajukan Ilmu Pengetahuan.”
- Mahesa, Lutfi Putra. 2023, “Manajemen Perpustakaan Baitul Hikmah Pada Masa Bani Abbasiyah” 3, no. 2, 1-10.
- Masruroh, Siti. 2021, “Peradaban Masa Harun Ar Rasyid Pada Dinasti Abbasiyah” 9, 82-93.
- Mei, Received, Revised Mei, and Accepted Mei. 2025, “Hasil Penelitian Ini Menunjukkan Bahwa Kemajuan Dan Perkembangan Perpustakaan Terjadi Pada Masa Khalifah Harun Ar- Rasyid Dan Al-Makmum Yang Menjadikan Bayt Al-Hikmah Sebagai” 8, no. 5.
- Muftaza, F, and N Aziz. 2025, “Social Transformation and Class Mobility in Abbasid Society.” *Journal of Middle Eastern Studies* 19, no. 1, 67-84: doi:10.1017/jmes.2025.018.
- Muwafiq, Ahmad, and Lintas Historis. 2024, “Potret Studi Islam Dalam Lintasan Historis” 09, no. 02, 191-212.
- Ningrum, S, H Pratiwi, and F Hasanah. 2022, “Nasab Verification and Inheritance Disputes in Indonesian Religious Courts.” *Indonesian Journal of Family Law* 7, no. 2, 110-28.
- Palihin, Ahmad, Rini Eka Putri, Universitas Islam, Negeri Sultan, and Syarif Kasim. 2025, “Sejarah Dinasti Abbasiyah Perkembangan Pendidikan Islam Modern” 6, no. 1, 225-36.
- Perkembangan, Sejarah, Dunia Islam, Dari Abad Kuno, and Modern Hingga Kontemporer. 2025, “Jurnal Pesona Indonesia” 2, no. 2, 88-94.
- Ramadhan, Muhammad Izzat, and Andi Abdul Hamzah. 2025, “Ajamiy : Jurnal Bahasa Dan Sastra Arab Abad Keemasan Islam : Periode Abbasiyah Sebagai Zaman Keemasan Sastra Arab” 14, no. 2, 636-53.
- Revansya, Elsanía, Wulan Aprilia, Tsaniah Marta, Rizqi Nur, Baiq Aziza, and Suci Ramadhania. 2024, “Menyelami Sejarah Peradaban Islam Dari Konsep Hingga Metode Penggalan Yang Mendalam” 1, no. 2, 38-43.
- Rohma, Ahla Ibtisyamur. 2025, “Peran Aktif Perempuan Dalam Kemajuan Peradaban Islam Dari Masa Ke Masa” 5, no. 2.
- Rohman, Miftahur, Zulkipli Lessy, and Nurul Faizah. 2019, “Problematika Pembelajaran Sejarah Kebudayaan Islam Kurikulum KMA 183 Tahun 2019 Madrasah Ibtidaiyah” 9, no. 2.
- Sari, Restiana Mustika, and Yudi Setiadi. 2020, “The Golden Age of Islam : Antara Pemikiran Dan Peradaban Abad Pertengahan” 2, 25-30.
- Siregar, Romadhan, Agung Prasetyo, Faris Naufal, Marzuki Manurung, Prodi Ilmu, Al- Qur, Fakultas Ushuluddin, and Studi Islam. n.d. “Pemikiran Politik Pada Masa Dinasti Umayyah Dan Abbasiyah” 7, 108-23.
- Subagiya, Bahrum. 2024, “Islamic Learning Horizons : Kepemimpinan Visioner Khalifah Harun Al-Rasyid Dalam Pengembangan Ilmu Pengetahuan Di Masa Peradaban Islam,” no. March, 1-10.
- Supriatna, Endang. 2024, “Kajian Pemikiran Tokoh Pendidikan Dunia” 15, 73-80.